

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan Inflasi Kabupaten Enrekang pada tahun 2023 samapai dengan Tahun 2024 sebesar 2,81 dengan Indeks Harga Konsumen sebesar 2,81 Persen dengan Indeks Harga Konsumen sebesar 117,35 dari beberapa kota IHK dan beberapa komoditas yang mempengaruhi Inflasi antara lain Beras, Caba Rawit, Angkutan Udara, Emas perhiasan, Cabe Merah, bawang Putih, Gula Pasir dan Minyak Goreng, Daging, Telur Ayam Ras, sehingga sangat mempengaruhi karena tingginya harga bahan Pokok tersebut, Resiko kedepanya diharapkan Pemerintah Kabupaten Kota untuk sering turun kelapangan untuk memantau harga bahan pokok segingga dapat di ketahui komoditas yang menyebabkan terjadinya Inflasi, dan melakukan pemantauan harga bahan kebutuhan pokok untuk mengantisipasi naiknya harga di Pasar Tradisional bisa ditekan/diminimalisir dan untuk menekan kenaikan harga juga Pemerintah mengadakan Pasar Murah dan bekerjasama dengan Bulog Sidrap sehingga dapat membantu masyarakat di dalam Pemenuhan kebutuhan pokok sehari hari.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Permasalahan Pengendalian Inflasi di Daerah terutama di Kabupaten Enrekang terdiri dari, Penegndalian Inflasi rendahnya Konektivitas jaringan Distribusi Pangan yang di maksud adalah permasalahan konektivitas yang di hadapi oleh Daerah yang mana ketergantungan pasokan antar daerah yang cukup tinggi, Kesenjangan Informasi dan Distorsi Struktur Pasar menyebabkan tidak efisiennya harga di pasar sedangkan Distorsi Struktur pPasar di timbulkan adanya kekauan dalam perilaku pembentukan harga, Produktivitas Pangan di pengaruhi oleh Iklim menjadi tantangan yang dihadapi terutama Produksi Pangan sehingga Pemerintah Kabupaten Kota mengadakan pemantauan dan perbaikan di sisi Distribusi dan diperkuat kerjasama dengan aparat hukum dan peningkatan jam kerja sehingga dapat meningkatkan Produktifitas masyarakat

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah terutama di Kabupaten Enrekang yaitu dengan melakukan Pemantauan Harga Bahan Pokok di Pasar, Melakukan Pasar Murah, Meningkatkan Hasil Produksi, mempermudah masuknya barang Impor, menstabilkan pendapatan masyarakat (tingkat Upah), menetapkan harga maksimum serta melakukan pengawasan Distribusi barang, dan menerapkan kebijakan Moneter yang ketat dengan mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengurangi permintaan dan mendorong stabilitas harga, mengurangi permintaan agregat, pengendalian Upah untuk mengurangi biaya Produksi agar harga barang tetap stabil, melakukan Intervensi pasar dengan membeli atau menjual barang tertentu untuk mengatur penawaran dan permintaan, Meningkatkan Produksi barang dan Jasa dan membantu memenuhi permintaan yang tinggi dan BPS (Badan Pusat Statistik) mengumumkan angka Inflasi secara Transparan hingga tingkat Kabupaten/Kota agar memberikan Informasi yang akurat kepada masyarakat dan mempengaruhi kebijakan Pengendalian Inflasi.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Enrekang terdiri dari Menambah Hasil Produksi dengan cara memberikan kebijakan kepada masyarakat untuk menggenjot produksi agar lebih banyak lagi dengan banyaknya barang yang beredar. Pengendalian Harga maka perputaran uang akan semakin cepat dan banyak sehingga uang beredar menjadi kembali seimbang, mempermudah masuknya barang impor salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Menetapkan Harga Maksimum agar harga barang cenderung naik tak terkendali sehingga membuat daya beli masyarakat menurun, sehingga Pemerintah berharap agar daya beli masyarakat menjadi lebih baik lagi, Pengawasan Distribusi Barang merupakan salah satu cara mengatasi inflasi agar tidak terjadi kenaikan harga barang yang meningkat, Pengendalian Harga Beras menjadi Prioritas Utama karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang dampaknya dirasakan langsung dan mempunyai multi efek terhadap harga barang jasa lainnya, Meningkatkan sinergitas melalui Tim Pengendalian Inflasi, Satgas Pangan, Forkofinda dan Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah terdiri dari, Melakukan Komunikasi Publik yang tidak membuat masyarakat panik dan mengupayakan masyarakat tetap tenang, Mengaktifkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah pada Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota agar bersinergi dan konsisten dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Mengaktifkan Satgas Pangan di Daerah yang memiliki tugas melaporkan harga dan ketersediaan komoditas untuk dilaporkan kepada Daerah secara berjenjang kepada Kemendagri dan mengecek langsung ke Lapangan terkait harga dan ketersediaan komoditas termasuk masalah yang terjadi, BBM Subsidi tepat sasaran ke masyarakat tidak mampu sehingga perlu pengawasan oleh Pemda dan bantuan pengawasan dari penegak hukum, Gerakan tanam pangan cepat panen yakni gerakan menanam seperti Cabe merah dan bawang merah untuk mencukupi ketersediaan pangan rumah tangga, Kerjasama antar Daerah meliputi seluruh Komoditas Pangan Strategis di setiap item komoditas dikaji oleh setiap Daerah, BPS dan BI beserta Provinsi mengumumkan angka Inflasi sehingga tingkat Kabupaten/Kota, Jadikan Isu Pengendalian Inflasi sebagai isu Prioritas sehingga seluruh stakeholder bersinergi.